

BAB II

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, Indonesia berusaha untuk terlibat aktif dalam kancah internasional baik itu tergabung ke dalam berbagai organisasi internasional maupun melakukan kerjasama di beberapa bidang seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK. Keterlibatan Indonesia di berbagai kegiatan internasional di mana pelaksanaannya selalu sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Politik luar negeri Indonesia mengedepankan prinsip bebas dan aktif, di mana bebas yaitu Indonesia tidak memihak salah satu kekuatan dunia dan Indonesia juga bebas dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang diambil demi mewujudkan kesejahteraan serta kedaulatan negara Indonesia. Indonesia juga aktif dalam kancah internasional di mana Indonesia ikut andil dalam percaturan politik internasional baik itu membantu menyelesaikan permasalahan internasional maupun ikut membantu menjaga perdamaian dunia.

A. Politik Luar Negeri Indonesia dari Masa Soekarno – Jokowi

Pemerintah Indonesia telah melalui pasang surut dalam politik luar negerinya dari masa pemerintahan Presiden Soekarno sampai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Pasang surut dalam politik luar negeri tidak jauh dari

perubahan situasi dalam negeri maupun situasi internasional yang dihadapi oleh Indonesia.

1. Politik Luar Negeri di Masa Presiden Soekarno

Ir. Soekarno merupakan Presiden pertama Indonesia yang didampingi oleh wakil Presiden yaitu Moh. Hatta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta telah memimpin negara Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai 1967. Soekarno sendiri merupakan sosok yang kuat dan karismatik di mata Indonesia maupun dunia, bahkan Soekarno pernah dinobatkan sebagai “Presiden Seumur Hidup” oleh masyarakat Indonesia. Sikap kepemimpinan Soekarno yang terbilang konfrontatif serta bersifat *high profile* membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak dianggap remeh oleh masyarakat internasional.

Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno bersifat *high profile*, anti kolonialisme serta imperialisme, dan menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis. Pada masa pemerintahan Soekarno, Moh.Hatta mencetuskan bahwa negara Indonesia adalah negara pencetus adanya gerakan non blok dan Indonesia juga menegaskan bahwa politik luar negerinya bebas dan aktif. Namun dalam pelaksanaannya, prinsip bebas-aktif tidak diterapkan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Indonesia, di bawah kepemimpinan Soekarno cenderung ke arah negara-negara komunis seperti China, USSR (Rusia). Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya aliansi Indonesia dengan beberapa negara komunis dan gabungannya Indonesia ke dalam poros-poros politik yang dibentuk oleh negara-negara komunis yang disebut

sebagai Poros Jakarta Peking yang berkembang menjadi poros Jakarta-PhnomPenh-Hanoi-Pyongyang-Peking.¹

Arah kebijakan pada masa pemerintahan Soekarno lebih menekankan pada adanya pengakuan internasional atas kedaulatan negara Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Prioritas utama dari politik luar negeri republik Indonesia pada pasca kemerdekaan lebih ke pengakuan internasional dan sikap penentangan terhadap segala bentuk penjajahan. Presiden Soekarno berusaha untuk mempromosikan Indonesia ke lingkungan internasional dengan slogan “Nasakom atau Nasionalis , agama, dan komunis”.

Di masa pemerintahan Soekarno yaitu masa orde lama, merupakan titik awal dari bagaimana Indonesia akan kedepannya baik sebagai awal dari strategi dan kebijakan luar negerinya maupun titik awal dari nasib Indonesia di ranah percaturan politik dunia. Di masa Soekarno Indonesia juga turut andil dalam memprakarsai beberapa momentum penting seperti Konferensi Asia-Afrika, Konferensi Meja Bundar, Konferensi Irian Barat dan Malaysia. Keterlibatan Indonesia dalam peristiwa penting dunia membuat eksistensi Indonesia dapat dikenal dan diakui oleh masyarakat internasional.

2. Politik Luar Negeri di Masa Presiden Soeharto

Presiden Soeharto dilantik menjadi Presiden kedua Indonesia yang dilantik pada 12 Maret 1967. Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia dengan kepemimpinan yang terlama, yaitu sekitar 32 tahun. Presiden Soeharto memimpin negara Republik Indonesia sampai tahun 1998.

¹ Aula Rusyadi, A. (2014). Hubungan Indonesia - China Pasca Normalisasi tahun 1990. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol.3, No.1, hlm. 86.

Di masa pemerintahan Soeharto, pusat kekuasaan dipegang oleh pemerintah pusat dan membuat rakyat Indonesia tidak memiliki andil atau peran dalam berbagai bidang. Juga, terjadinya perubahan dari masa pemerintahan Soekarno yaitu orde lama ke masa pemerintahan Soeharto yaitu orde baru dimana terjadi banyak perubahan baik disektor pemerintahan maupun hubungan negara Indonesia dengan negara lain.

Politik luar negeri pada masa pemerintahan Soeharto memiliki sifat *low profile* dan cenderung condong ke negara barat. Prinsip politik luar negeri Indonesia masih menggunakan paham bebas dan aktif. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas-aktif lebih terlaksana dengan baik dan menerapkan apa yang disebut “bebas-aktif”. Di masa pemerintahan Soekarno, hubungan dengan negara-negara barat tidak berjalan dengan baik sedangkan pada masa pemerintahan Soeharto justru sebaliknya, yakni Indonesia kembali menjalin hubungan baik dengan negara-negara barat. Indonesia juga aktif dalam berbagai kegiatan di ranah internasional dan menjalin kerjasama dengan negara lain di beberapa sektor seperti perekonomian.

Pusat kekuasaan yang hanya dipegang oleh pemerintah pusat saja membuat rakyat Indonesia merasa tidak diakui perannya serta tidak didengar pendapatnya. Seiring dengan munculnya gerakan reformasi di seluruh Indonesia yang menuntut Soeharto agar turun dari kursi kepemimpinan. Pada tahun 1998, akhirnya Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie.²

² Kementerian Kelautan an Perikanan. (2014). *Perkembangan Politik Luar Negeri Terutama Kerjasama Negara-Negara ASEAN*. Retrieved January 10, 2018, from Ropeg KKP: ropeg.kkp.go.id. hlm. 10

3. Politik Luar Negeri di Masa Presiden B.J Habibie

Setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden, B.J. Habibie yang selaku Wakil Presiden pada masa pemerintahan Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga pada tahun 1998. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie yang terkesan tenang dan berwibawa. Namun sayangnya, pemerintahan Habibie hanya berlangsung singkat dan selama masa kepemimpinannya, Presiden Habibie telah melewati atau menghadapi berbagai kondisi dan situasi Indonesia yang pada masa itu sedang mengalami krisis negara. Tidak sedikit kontroversi dan kecaman dari masyarakat Indonesia terhadap pengangkatan Habibie sebagai Presiden Indonesia yang ketiga.

Kondisi Indonesia selepas diturunkannya rezim Soeharto telah meninggalkan permasalahan dalam negeri, banyaknya tindak korupsi; kolusi; dan nepotisme di berbagai kalangan di Indonesia membuat negara mengalami krisis hingga adanya beban hutang luar negeri yang harus ditanggung Indonesia. Krisis moneter yang menimpa Indonesia di akhir tahun 1990-an mengakibatkan Indonesia mengalami keterpurukan. Masalah tersebut berusaha diperbaiki oleh kepemimpinan B.J. Habibie melalui berbagai upaya, seperti menjalin komunikasi dengan pihak-pihak keuangan negara seperti World Bank dan menyakinkannya agar mendapatkan kepercayaan dan pinjaman uang dari pihak asing.

Di masa kepemimpinan B.J. Habibie berusaha untuk membangun kembali sistem ekonomi-politik yang sempat terpuruk akibat dari rezim otoriter Soeharto. Berbagai upaya dilakukan baik itu ditingkat domestik maupun internasional. Di tingkat domestik, pemerintahan Habibie menghasilkan Undang-undang tentang perlindungan HAM, mengadakan ratifikasi konvensi internasional terkait kesejahteraan ataupun hak para pekerja, serta

terbentuknya KOMNAS Perempuan. Di tingkat internasional, berhasil membuat kesepakatan yang dinamakan “Protokol Kyoto”, dan juga Indonesia telah mendapatkan kepercayaan kembali dari IMF, World Bank dimana kedua institusi tersebut dapat membantu Indonesia untuk mengatasi krisis moneter yang sedang dihadapi.³

Pelaksanaan politik luar negeri pada masa pemerintahan Habibie terbilang gagal, dan juga memberikan nilai kerugian bagi Indonesia. Terkait dengan lepasnya Timor-Timur dan Pulau Sipadan-Ligitan serta krisis ekonomi yang membuat kepemimpinan Habibie dinilai gagal dalam membawa Indonesia mencapai kepentingan nasionalnya yaitu kesejahteraan bangsa.

4. Politik Luar Negeri di Masa Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur)

Abdurahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur dilantik sebagai Presiden keempat Indonesia menggantikan Presiden Indonesia sebelumnya yaitu B.J. Habibie. Gus Dur dilantik pada Oktober 1999 dan didampingi oleh Wakil Presidennya yaitu Megawati Soekarnoputri yang dilantik sehari kemudian.

Politik Luar Negeri yang dijalankan pada masa pemerintahan Gus Dur mirip dengan politik luar negeri pada masa pemerintahan Soekarno. Politik luar negeri pada masa pemerintahan Gus Dur juga lebih menekankan pada citra Indonesia di mata dunia. Namun hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara barat mulai mengalami kemunduran. Berbagai kebijakan luar negeri

³ Nur Alami, A. (2016). *Profil dan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru*. Retrieved January 10, 2018, from LIPI: ejournal.politik.lipi.go.id

yang diambil pada masa pemerintahan Gus Dur seperti adanya pelaksanaan “Diplomasi Persatuan” yaitu dengan melakukan perjalanan keliling ke 80 negara dalam kurun waktu 20 bulan yang dilakukan oleh Gus Dur demi memperkuat komitmen dunia terhadap Indonesia dan agar Indonesia memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat internasional. Selain itu, Gus Dur juga memperkenalkan tiga elemen politik luar negerinya yaitu Pertama, menjaga jarak yang sama dengan negara tetangga; Kedua, hidup bertetangga dengan baik; dan Ketiga adalah melaksanakan kebijakan universal.⁴

Salah satu kebijakan luar negeri yang cukup membuat kontroversi dari masyarakat Indonesia bahkan dunia internasional adalah rencana dibukanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Kebijakan luar negeri yang dibuat pada masa pemerintahan Gus Dur dinilai kurang efisien dan justru tidak fokus terhadap kepentingan nasional Indonesia sendiri, akhirnya Gus Dur diberhentikan dari kursi pemerintahannya sebagai Presiden sebelum masa jabatannya berakhir dan digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarnoputri.

5. Politik Luar Negeri di Masa Presiden Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden Indonesia kelima menggantikan Abdurahman Wahid yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden. Selama dua setengah tahun Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia dan merupakan wanita pertama yang menjadi Presiden di Indonesia. Dibawah kepemimpinan Megawati, Indonesia sedang dilanda berbagai ancaman terorisme di

⁴ S, Budiarto. (2010). *Politik Luar Negeri Gus Dur*. Retrieved Desember 30, 2017, from Kompas: www.kompas.com

beberapa titik di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pada pemerintahan Megawati lebih berfokus pada peningkatan keamanan negara yaitu penanggulangan terorisme.

Politik luar negeri dibawah kepemimpinan Megawati menggunakan prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Fokus utama dari politik luar negeri Megawati ialah meningkatkan keamanan nasional dan turut ikut aktif dalam memberantas tindak terorisme di lingkungan internasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk memerangi tindak terorisme di seluruh penjuru dunia.⁵

Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Megawati seperti kunjungan kerja Megawati yang diprioritaskan ke wilayah-wilayah konflik seperti di Timur-Timor. Selain itu, salah satu keberhasilan pada masa pemerintahan Megawati ialah terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama dimana Megawati mencalonkan dirinya lagi sebagai Presiden, namun pemilu yang diadakan pertama kali pada tahun 2004 tersebut tidak membuahkan hasil yang baik bagi Megawati dikarenakan lawannya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang menang dan dilantik sebagai Presiden Indonesia selanjutnya.

6. Politik Luar Negeri di Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik menjadi Presiden Indonesia ke enam menggantikan Megawati

⁵ Kemntrian Kelautan dan Perikanan. (2014). *Perkembangan Politik Luar Negeri Terutama Kerjasama Negara-Negara ASEAN*. Retrieved January 10, 2018, from Ropeg KKP: ropeg.kkp.go.id. hlm. 22

Soekarnoputri selaku Presiden ke 5 Republik Indonesia. Presiden SBY yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla terpilih melalui sistem Pemilu yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 2004. SBY mengemban tugas menjadi Presiden selama 2 periode berturut-turut dimana 1 periode memakan waktu selama 5 tahun. Pada periode pertama (2004 - 2009) SBY terpilih menjadi Presiden Indonesia ke 6 yang didampingi oleh Jusuf Kalla, sementara pada periode ke 2 (2009 - 2014) SBY didampingi oleh Boediono sebagai Wakil Presiden.⁶

Sikap kepemimpinan SBY yang berlatar belakang militer, menjadikan sosok SBY cenderung tegas dan protokoler atau sesuai dengan aturan dalam setiap agenda kerjanya. Karakteristik SBY yang lebih ke militeristik membuat selalu tegas dan keras dalam mengambil tindakan baik dalam kepentingan masyarakat Indonesia maupun negara. Dalam setiap pelaksanaan kerja, SBY selalu menekankan pada aturan yang ada.

Politik luar negeri pada masa pemerintahan SBY memiliki kesamaan saat era Soeharto yaitu lebih berfokus terhadap masalah-masalah global. Pada masa pemerintahan Soeharto, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diumpamakan dengan istilah “*bagaikan mendayung diantara dua karang*”, konsep tersebut menggambarkan politik luar negeri Indonesia itu didasarkan tanpa sentimen dan lebih memperhatikan aspek realitas dan kepentingan negara. Sementara pada masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah “*mengarungi lautan bergelombang*”, dimana dapat terlihat pada usaha Indonesia yang berupaya untuk menjembatani negara maupun pihak-pihak yang sedang bermasalah. Politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan SBY terdapat tiga strategi utama yaitu :

⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2014). *Perkembangan Politik Luar Negeri Terutama Kerjasama Negara-Negara ASEAN*. Retrieved January 10, 2018, from Ropeg KKP: ropeg.kkp.go.id. hlm. 24

- 1) Indonesia tetap memberikan prioritas pada proses pembangunan komunitas regional dengan memberikan penekanan pada fungsi dan manfaat dari multilateralisme, yang direalisasikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam partisipan aktif di berbagai institusi kunci regional seperti ASEAN; ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan, dan China); ASEAN Regional Forum (ARF); East Asia Summit (EAS); dan APEC.
- 2) Indonesia mengakui perjanjian bilateral dalam kerangka kemitraan strategis dan komprehensif dengan major dan regional powers seperti China, India, Korea Selatan, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat.
- 3) Indonesia juga berkontribusi aktif dalam upaya-upaya global untuk menemukan solusi atas masalah krisis ekonomi, keamanan, energi, pangan, dan perubahan iklim. Kontribusi aktif Indonesia direalisasikan dengan bergabung dalam G-20.⁷

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY yang menfokuskan pada permasalahan global memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mendorong terbentuknya berbagai kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan negara lainnya.
- 2) Indonesia memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, baik itu perubahan domestik maupun perubahan yang terjadi di wilayah internasional.
- 3) Indonesia memiliki sifat pragmatis kreatif dan oportunitis, dimana Indonesia mencoba menjalin

⁷ Denmark, A. M., Sukma, R., & Parthemore, C. (2010). *Crafting a Strategic Vision : A New Era of U.S - Indonesia Relations. Center for a New American Security*, hlm. 41.

hubungan dengan siapa saja yang bersedia membantu dan memberikan keuntungan bagi Indonesia, baik itu dengan negara; organisasi internasional; maupun perusahaan multinasional.

- 4) TRUST, konsep ini dikembangkan untuk membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam konsep TRUST yaitu *unity, harmony, security, leadership, dan prosperity*. Indonesia menjadikan konsep TRUST sebagai sasaran politik luar negeri di masa pemerintahan SBY.
- 5) *Thousand friends Zero enemy*, semboyan ini digunakan oleh pemerintahan SBY dalam kebijakan luar negerinya. Maksudnya ialah tidak ada permusuhan dengan siapapun melainkan menjalin persahabatan dengan banyak teman dimana konsep tersebut dapat diartikan sebagai cinta perdamaian. Dapat dibilang, Indonesia ditunjukkan sebagai negara yang dapat dan mampu menjalin hubungan kerjasama ke segala penjuru yang dilukiskan SBY lewat istilah “*navigating a turbulent ocean*” yaitu mengarungi samudera yang bergejolak. Semboyan ini dilandasi atas prinsip “tanpa musuh”, yang dijadikan penekanan terhadap sikap Indonesia yang netral di kancah dunia yang semakin bergejolak.⁸

Kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan SBY lebih fokus untuk meningkatkan peran dan status Indonesia di percaturan politik internasional. Dalam dialog SBY dengan masyarakat di New Delhi, India pada November 2003 mengungkapkan bahwa “Globalisasi adalah keniscayaan. Oleh karena itu, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dengan suasana globalisasi ini, menempatkan dirinya dalam kerjasama

⁸ Falahi, Z. (2013). Memikirkan Kembali Arti "Million Friends Zero Enemy" dalam Era Paradox of Plenty. *Indonesia for Global Justice: Jakarta Jurnal Global & Strategic Th.7, No.2*.hlm. 228 - 229.

global dan mengembangkan agenda-agenda kerjasama global demi memenuhi kepentingan nasional negaranya.”⁹ Beberapa keberhasilan dalam kinerja negara pada masa pemerintahan SBY seperti :

- 1) Menyelesaikan masalah sengketa perbatasan negara Indonesia dengan negara lainnya seperti masalah wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Timor Leste.
- 2) Meningkatkan kerjasama di ASEAN dalam bidang ekonomi internasional dimana Indonesia secara aktif mengikuti berbagai konferensi internasional seperti KTT APEC, KTT ASEAN, KTT Tsunami dan KTT Asia Afrika.
- 3) Pengiriman bantuan oleh Indonesia ke beberapa wilayah konflik seperti wilayah konflik Palestina-Israel. Bantuan yang diberikan seperti pengiriman pasukan Garuda ke wilayah konflik.¹⁰

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional dan peran aktif Indonesia dalam kegiatan internasional bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa Indonesia layak untuk diakui sebagai negara yang berdaulat dan eksis oleh masyarakat internasional.

Selama masa pemerintahan 2 periode SBY, Indonesia telah mendapatkan banyak pengakuan oleh negara-negara lain dan semakin diakui di mata dunia. Hal tersebut tidak jauh dari peran pemerintahan Indonesia dan masyarakat Indonesia. SBY memandang bahwa politik luar negeri

⁹ Faizasyah, T. (2005). *"Polugri 101" : 101 Kutipan Presiden SBY Mengenai Diplomasi RI dan Hubungan Internasional*. Jakarta: Red & White Publishing. Hlm. 52

¹⁰ PLNRI di Era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. (2014). *Jurnal Universitas Brawijaya Malang FISIP*, hlm. 09.

merupakan hasil dari proses berfikir yang mengedepankan aspek rasional dari pada emosional dan mengutamakan pendekatan lunak atau soft power dari pada hard power. Dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia menerapkan sikap percaya diri dan semangat menjalin kemitraan dengan negara lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan nasionalnya.¹¹

7. Politik Luar Negeri di Masa Presiden Jokowi

Setelah memimpin Indonesia selama 2 periode, Presiden SBY digantikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke tujuh. Presiden Jokowi terpilih sebagai Presiden RI ke 7 setelah memenangkan pertarungan Pemilu dengan Prabowo sebagai kandidat lawannya. Pada Pemilu Juli 2014, Jokowi dan pasangannya Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode 2014 – 2019. Alasan Jokowi menggandeng Jusuf Kalla sebagai pasangannya, dimana sebelumnya Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai wakil presiden pada era SBY, dikarenakan Jusuf Kalla memiliki elektabilitas; pengalaman rekam jejak; integritas; dan kompetensi serta keduanya (Jokowi-JK) memiliki gaya kepemimpinan yang serupa.¹² Gaya kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang terbilang unik, salah satu ciri khasnya yaitu melakukan “blusukan”, yaitu secara langsung Presiden Jokowi turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat Indonesia. Gaya blusukan Jokowi memang sudah dilakukannya sejak Jokowi pernah

¹¹ Wirajuda, H. (2005). Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia. *Analisis CSIS Vol.hlm. 34*, 343.

¹² Jatmika, S. (2014). *The Miracle Of JOKOWI*. Yogyakarta: Penerbit Maharsa.

menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta lalu. Konsep kepemimpinan Jokowi yang dapat dibilang *servant*, konsep ini dimana pemimpinlah yang menjadi seorang pelayan, maksudnya ialah Jokowi selaku pemimpin negara Indonesia secara langsung terjun kedalam kehidupan masyarakat dan mengetahui bagaimana nasib dan keluhan yang mereka alami. Karakter diri Jokowi yang terbilang tegas dan konsisten serta Jokowi yang terkesan sederhana membuat sosok Jokowi dikagumi dan dihormati oleh masyarakat Indonesia.

Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi masih tetap menggunakan prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif, dimana prinsip tersebut telah digunakan sejak masa pemerintahan Soekarno. Pelaksanaan prinsip politik luar negeri bebas-aktif dimasa Presiden Soekarno adalah dengan tidak memihak pada salah satu kubu kekuatan dunia yaitu blok kekuatan barat dan timur serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Sementara, Presiden Jokowi tetap menggunakan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Dalam pidato pertama Jokowi setelah dilantik sebagai Presiden menyatakan bahwa, “Saya ingin menegaskan bahwa (dalam) pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara terbesar ketiga, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif, yang diartikan untuk kepentingan nasional dan untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “. ¹³ Pelaksanaan politik luar negeri yang menekankan prinsip bebas-aktif memiliki perubahan makna dari masa Presiden Soekarno, dimana disesuaikan dengan kondisi lingkungan saat masa

¹³ Waluyo, A. (2014). *Politik Luar Negeri Bebas Aktif Masih Jadi Pijakan Pemerintahan Presiden Jokowi*. Retrieved January 18, 2018, from VOA Indonesia: www.voaindonesia.com

pemerintahan Jokowi berlangsung. Prinsip “bebas”-nya tidak hanya bermakna negara Indonesia tidak memihak blok barat maupun blok timur namun juga prinsip “bebas”-nya dimaknai sebagai “kebebasan” Indonesia dengan mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian nasional.¹⁴ Makna dari prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif memiliki makna ganda, yaitu pertama bertujuan untuk memelihara identitas nasional, dan yang kedua adalah bahwa politik luar negeri juga ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional yang telah tertanam dalam pembukaan UUD 1945 (‘. mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia..’).

Kebijakan luar negeri masa Jokowi memiliki beberapa tujuan demi mencapai kepentingan nasional negara, seperti:

- 1) Mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan menjalin hubungan kerjasama internasional. Dapat dibilang, Presiden Jokowi menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Istilah “Poros maritim dunia” sendiri dapat dimaknai dalam 3 unsur yakni sebagai cita-cita, doktrin, dan strategi . Sebagai cita-cita, istilah “poros maritim dunia” menggambarkan seruan besar untuk kembali ke jati diri negara Indonesia yaitu negara kepulauan.¹⁵
- 2) Memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik.

¹⁴ Situmorang, M. (2014). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. hlm. 69-71.

¹⁵ *Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. (2014, November 15). Retrieved January 18, 2018, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: www.kemlu.go.id

- 3) Meningkatkan peran global melalui diplomasi *middle power*, dimana menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional secara selektif dan kekuatan global dengan memberikan prioritas kepada permasalahan terkait kepentingan bangsa dan negara.
- 4) Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi, dan keterlibatan masyarakat.

Presiden Jokowi juga mengemukakan beberapa prioritas utama dalam pelaksanaan politik luar negerinya, seperti :

- 1) Perlindungan WNI (Warga Negara Indonesia, termasuk TKI (Tenaga Kerja Indonesia)) di luar negeri. Kegagalan dalam pemerintahan Presiden sebelumnya yaitu SBY dalam melindungi WNI di luar negeri, terbukti dengan beberapa kasus hukuman mati yang menimpa sejumlah TKI. Hal tersebut menjadi alasan di balik karakteristik kebijakan Presiden Jokowi yang memprioritaskan pada perlindungan WNI di luar negeri,
- 2) Perlindungan Sumber Daya Alam,
- 3) Produktivitas perekonomian, dan
- 4) Pertahanan keamanan nasional, regional dan perdamaian dunia.

Salah satu bentuk kebijakan yang telah menarik perhatian dunia yaitu kebijakan luar negeri Presiden Jokowi untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dengan menenggelamkan kapal ikan asing illegal yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing illegal dilaksanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti. Dalam setiap pengeksekusian kapal ikan asing illegal selalu menarik perhatian masyarakat Indonesia maupun luar.

Prinsip politik luar negeri Presiden Jokowi, yaitu mengemukakan semua negara merupakan sahabat, tetapi

apabila ada negara yang mengancam kedaulatan negara, hal itu tidak akan dapat ditolerir dan harus mendapatkan tindakan tegas dari Presiden Jokowi.¹⁶

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diwujudkan dengan keterlibatan Indonesia dalam membantu menyelesaikan kasus maupun permasalahan internasional. Dalam membantu menyelesaikan kasus maupun permasalahan internasional, Indonesia berupaya untuk memberikan bantuan melalui pendekatan yakni diplomasi. Langkah diplomasi yang biasa digunakan oleh pemerintah Indonesia yakni *soft diplomacy* atau diplomasi lunak. Langkah pemerintah Indonesia melalui metode *soft diplomacy* dalam membantu kasus-kasus internasional telah terbukti keberhasilannya seperti saat terjadinya konflik di Kamboja, Indonesia turun tangan dalam membantu penyelesaian konflik tersebut.

B. Jakarta Informal Meeting (JIM)

Konflik yang terjadi di Kamboja yang melibatkan pihak Vietnam pada tahun 1978, telah menggerakkan Indonesia sebagai bagian dari negara anggota ASEAN. Indonesia menjadi pihak yang penting dalam penyelesaian konflik antara Kamboja dan Vietnam. Posisi Indonesia sebagai pihak ketiga atau mediator, Indonesia sebagai pihak netral berusaha untuk mencari solusi perdamaian dari pihak-pihak yang berkonflik. Indonesia berusaha mengundang dan mengumpulkan pihak-pihak yang berseteru di satu tempat dan merundingkan solusi penyelesaian terbaik untuk mencapai perdamaian di kedua pihak. Peristiwa tersebut dikenal sebagai JIM atau *Jakarta Informal Meeting*.

¹⁶ Laporan Hasil Wawancara Nur Amaliyah (Mahasiswa Universitas Hasanuddin) dengan Pejabat Kementerian Luar Negeri Boy Dharmawan pada tahun 2015.

Jakarta Informal Meeting (JIM) adalah upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam dimana Indonesia memainkan peran penting yaitu sebagai mediator. Indonesia menjadi tuan rumah bagi terlaksananya Jakarta Informal Meeting yang dibagi menjadi dua sesi yaitu JIM I dan JIM II. Konflik yang terjadi antara Vietnam dan Kamboja dengan jelas mengganggu stabilitas Asia Tenggara dan lingkungan internasional. Sikap dari kedua negara yaitu Kamboja dan Vietnam membuat geram masyarakat internasional khususnya kawasan ASEAN.

Konflik yang terjadi antara Kamboja dan Vietnam bermula dari adanya konflik internal yang terjadi di Kamboja. Konflik internal yang terjadi di Kamboja dipicu oleh adanya pergolakan dan perebutan kekuatan fraksi-fraksi politik di dalam negeri. Fraksi-fraksi yang ada di Kamboja, seperti Fraksi Lon Nol, Fraksi Norodom Sihanouk (fraksi partai Sangkum Reastr Niyum), dan Fraksi Khmer Merah pimpinan Pol Pot. Berdasarkan Perjanjian Vointainebleu, Kamboja menjadi negara merdeka dan memperoleh kemerdekaan penuh dari Prancis pada tahun 1955 dengan Pangeran Norodom Sihanouk yang berasal dari Fraksi partai Sangkum Reastr Niyum diangkat menjadi Presiden Kamboja. Dalam pernyataan Presiden Sihanouk menyatakan bahwa negara Kamboja merupakan negara netral yang tidak akan terlibat dalam perang Vietnam yang sedang terjadi pada masa pemerintahannya. Justru pernyataan tersebut mengundang reaksi negatif dari kubu militer yang pro Amerika Serikat yaitu Jendral Lon Nol.¹⁷ Pada tahun 1967, Presiden Kamboja yakni Pangeran Sihanouk melakukan perombakan kabinet dimana Perdana Menteri Kamboja Jendral Lon Nol diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Son Nam. Perdana Menteri Son Sann yang menjadikan negara menganut aliran komunis China.

¹⁷ Tully, J. (2006). *A Story of Cambodia : From Empire to Survival* . Thailand: Silkworm Books. hlm. 177

Di tahun 1970, saat Pangeran Sihanouk melakukan kunjungan ke Moscow, terjadi pemberontakan di Kamboja yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Lon Nol. Jendral Lon Nol berhasil menggulingkan kepemimpinan Pangeran Sihanouk di Kamboja dan menjadikan dirinya sebagai Presiden Kamboja. Pangeran Sihanouk yang telah digulingkan dari kepemimpinannya melarikan diri ke Beijing dan memilih berkoalisi dengan fraksi Khmer Merah pimpinan Pol Pot untuk menjatuhkan kepemimpinan Jendral Lon Nol serta berusaha untuk merebut kembali tahta kepemimpinan di Kamboja. Pada tahun 1975, fraksi Khmer Merah pimpinan Pol Pot berhasil menggulingkan tahta kepemimpinan Jendral Lon Nol. Negara Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot juga mengubah format negara dari kerajaan Kamboja menjadi Republik Demokratik Kamboja atau Democratic Kampuchea (DK). Sayangnya, semenjak kepemimpinan Pol Pot, negara Kamboja secara terus menerus dilanda peristiwa dan tragedi yang merugikan masyarakat Kamboja. Dibawah pemerintahan Pol Pot, negara Kamboja diubah menjadi negara agraris. Namun salah satu program yang disebut Cambodia the Year Zero itu justru membuat masyarakat Kamboja sengsara dan menderita akibat dari adanya wabah penyakit dan kelaparan.

Pada tahun 1978, terjadi invasi Vietnam terhadap Kamboja dibawah rezim Khmer Merah. Terjadi bentrokan diperbatasan kedua negara yang dipicu oleh tragedi Genosida besar-besaran pada orang-orang keturunan Vietnam yang tinggal di Kamboja. Peristiwa genosida tersebut, membuat pihak Vietnam menyerang pemerintahan rezim Khmer Merah dan berhasil menggulingkannya dari tahta kepemimpinan. Vietnam yang berkoalisi dengan fraksi komunis dukungan Vietnam yang dipimpin oleh Heng Samrin mendirikan pemerintahan baru di Kamboja. Pemerintahan baru Kamboja dibawah kepemimpinan Heng Samrin ditentang keras, sehingga muncul fraksi perlawanan bentukan kaum nasionalis yang berkoalisi dengan Pangeran Sihanouk dan Khmer Merah yang dikenal sebagai Coalition Government of Democratic

Kampuchea (CGDK).¹⁸ Semenjak terjadi perlawanan dari CGDK, perang saudara terus berlanjut dan mengakibatkan pihak-pihak asing turut campur tangan dalam penanganan konflik yang sedang terjadi.

Konflik yang terjadi antara Vietnam dan Kamboja bukan hanya menjadi masalah di lingkungan Asia Tenggara saja, namun menjadi masalah di lingkungan internasional. Kedua belah pihak yaitu Vietnam dan Kamboja yang belum juga menemukan titik penyelesaian membuat pihak luar seperti ASEAN dan Indonesia ikut campur tangan dalam mencari solusi penyelesaian. Setelah melalui proses pendiskusian yang panjang dalam forum ASEAN, akhirnya terbentuklah kesepakatan untuk melakukan pertemuan dimana Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah tempat dilakukannya pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut dikenal sebagai JIM atau Jakarta Informal Meeting, dan pertemuan tersebut terdiri dari dua tahap yaitu tahap pertama JIM I dan tahap kedua JIM II.

Jakarta Informal Meeting (JIM I), pertemuan resmi yang pertama dilakukan di Kota Bogor pada tanggal 25 - 28 Juli 1988 tepatnya di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, dikumpulkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yaitu keempat fraksi yang bertikai. Keempat fraksi yang datang adalah Fraksi komunis dukungan Vietnam yang dipimpin oleh Heng Samrin dan Hung Sen, Fraksi pendukung pemerintah kerajaan yang dipimpin Pangeran Norodom Sihanouk, Fraksi komunis Khmer Merah yang dipimpin Khieu Samphan, dan Fraksi independen dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Son Sann.¹⁹

¹⁸ Indonesia, D. L. (2005). *Sejarah Diplomasi Republik dari Masa ke Masa : Periode 1966-1995*. Jakarta: Departemen Luar Negeri. hlm. 587

¹⁹ Prased, M. N. (2001). *Indonesia's Role in the Resolution of the Cambodian Problem*. New York: Routledge Revival.

Pada pertemuan JIM I, para pihak yang bertikai dikumpulkan kedalam satu ruangan untuk membahas mengenai jalan keluar terbaik untuk menghentikan konflik yang sedang berangsur. Kedua pihak yang saling bertikai memiliki kesamaan pemahaman tentang kebutuhan mendesak untuk mengakhiri penderitaan yang dialami oleh masyarakat, mereka sepakat mengenai kebutuhan untuk menyelesaikan masalah melalui cara-cara politik agar menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Pada pertemuan JIM I ini kedua pihak yang bertikai membahas mengenai dua hal penting, yaitu :

- a) Pertama, membahas mengenai rencana penarikan mundur pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja sebagai bentuk upaya damai,
- b) Kedua, melakukan pencegahan terhadap bangkitnya kembali kekuasaan rezim Khmer Merah Pol Pot agar tidak terulang kembali kebijakan genosida yang dilakukan terhadap masyarakat Kamboja, dan
- c) Ketiga, memastikan untuk menghentikan semua gangguan dari pihak asing dan suplai pasokan persenjataan bagi pasukan Kamboja.

Mereka menyadari bahwa konflik yang terjadi telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam banyak aspek dan mempengaruhi kedamaian lingkungan baik itu regional maupun internasional. Oleh karena itu, semua pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut telah menyepakati perlu adanya diskusi lanjut untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil dalam menghentikan konflik antara kedua pihak dikarenakan masih perlunya pertimbangan lebih lanjut. Indonesia sebagai pihak mediator membentuk sebuah kelompok kerja yang bertugas untuk memeriksa aspek-aspek spesifik dari solusi atau cara politik untuk penyelesaian masalah konflik yang terjadi. Dari pertemuan JIM I ini didapat hasil, yaitu :

1. Pada pertemuan *Jakarta Informal Meeting I*, para peserta telah sepakat untuk membentuk kelompok kerja untuk membantu penyelesaian konflik. Kelompok kerja yang dibentuk terdiri dari pejabat tinggi daerah dari semua pihak yang berpartisipasi dalam pertemuan JIM I.
2. Kelompok kerja yang telah dibentuk memiliki tugas untuk memeriksa aspek-aspek spesifik dari solusi atau cara politik yang digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi antara Kamboja dan Vietnam. Hasil dari data-data yang dikumpulkan harus selesai dan diserahkan pada bulan Desember 1988, dan
3. Persetujuan dari semua pihak yang hadir dalam pertemuan JIM I untuk diadakan pertemuan JIM berikutnya.²⁰

Jakarta Informal Meeting II (JIM II), diadakan dalam rangka menindaklanjuti pembahasan pada pertemuan JIM I pada 25 – 28 Juli 1988 silam. Pertemuan JIM II diadakan pada tanggal 16-18 Februari 1989 dan masih berlokasi di Istana Bogor, Indonesia. Pada pertemuan kedua ini dilaksanakan dan dihadiri oleh pihak-pihak yang hadir dalam JIM I yang ditambah beberapa anggota baru yaitu perwakilan dari negara Brunei Darussalam, Malaysia, Laos, Philipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand.

Untuk menindaklanjuti pembahasan yang dibicarakan pada pertemuan JIM I, maka dalam pertemuan JIM II ini berhasil disepakatinya poin-poin penting yang telah dibahas pada pertemuan JIM I sebelumnya, yaitu :

- a) Pertama, penarikan seluruh pasukan Vietnam di wilayah Kamboja yang harus dilakukan dengan batas waktu 30 September 1989. Setelah genjatan senjata dilakukan di seluruh wilayah Kamboja, maka akan dilakukan dengan segera proses penarikan semua pasukan Vietnam dari

²⁰ Prased, M. N. (2001). *Indonesia's Role in the Resolution of the Cambodian Problem*. New York: Routledge Revival.

wilayah Kamboja dari tentara Vietnam, penasehat militer, persenjataan, dan peralatan perang lainnya akan ditarik dengan tenggat waktu paling lambat pada tanggal 30 September 1989.

- b) Kedua, dibentuk suatu mekanisme pengawasan internasional yakni International Control Mechanism (ICM) yang fungsinya untuk memantau, mengawasi, memeriksa penarikan pasukan tentara Vietnam serta mencegah munculnya permusuhan bersenjata dan mengawasi jalannya Pemilu di Kamboja.

Tujuan dari diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting itu sendiri adalah untuk menyediakan kerangka diskusi informal diantara pihak-pihak yang bertikai, dalam pertemuan ini Indonesia sebagai sosok yang penting dalam berjalannya diskusi untuk mencari jalan tengah yang adil dan bertahan lama demi mencapai perdamaian di kedua pihak yang bertikai. Indonesia dijadikan sebagai tempat dari pertemuan itu berlangsung karena kedua belah pihak menganggap bahwa negara Indonesia memiliki posisi yang netral bagi pihak-pihak yang bertikai.

Peran Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik di Kamboja sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif Indonesia, dimana hal tersebut terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu turut aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Terpilihnya Indonesia sebagai mediator antara Vietnam dan Kamboja menunjukkan eksistensi dan peran Indonesia yang semakin menonjol dalam menghadapi maupun membantu penyelesaian masalah internasional. Upaya yang dilakukan Indonesia sebagai mediator yakni dengan mengundang pihak-pihak yang terlibat serta mengumpulkannya di meja perundingan demi mencari solusi damai terkait masalah yang terjadi. Selain memanggil pihak dari Kamboja, Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmaja (1978-1988), juga melakukan beberapa upaya seperti

menyakinkan pihak Vietnam untuk turut berpartisipasi dalam pertemuan JIM I melalui *Ho Chi Minh City Understanding*.

Perjuangan Menteri Luar Negeri sebelumnya Muchtar Kusumaatmadja dilanjutkan oleh Menteri Luar Negeri di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan B.J Habibie, yaitu Ali Alatas (1988-1999) yang berperan sebagai eksekutor terhadap jalannya proses mediasi. Dukungan yang kuat dari masyarakat internasional mengenai pertemuan JIM yang diadakan di Indonesia berkat perjuangan dari Ali Alatas yang membujuk dan mencari dukungan ke negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Terlaksananya JIM I dan JIM II merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan bagi Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Keberhasilan Indonesia sebagai mediator dalam konflik di Kamboja mendapatkan pengakuan dari negara-negara ASEAN dan membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai kemampuan untuk membantu mengatasi permasalahan internasional.